

**ANALISIS PERSEPSI DAN KINERJA DALAM PENINGKATAN KINERJA
PENGAWASAN DI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TUAL****Sigit Bintoro^{1*}, Ety Riani² Maman Rumanta³**¹ Graduate School, Open University, ² Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University, ³ Graduate School, Open University*Corresponding Author : bintorosigit721022@yahoo.co.id , bintoro721022@yahoo.co.id ,
etty_riani@apps.ipb.ac.id , mamanrumanta@ecampus.ut.ac.id**Abstract (English)**

Effective supervision is a key factor in maintaining sustainable resources and preventing illegal actions that are detrimental to the state, so it is necessary to look for strategies to improve the performance of supervisors at the Tual PSDKP Base which is important for IUU Fishing members. This research will support government policies in preventing and enforcing laws, as well as protecting the extinction of fisheries resources and marine ecosystems. This research aims to formulate a strategy to improve the performance of marine and fisheries resource supervisors at the Tual Marine and Fisheries Resources Monitoring Base (PSDKP). This research uses performance analysis and perception analysis using a descriptive approach. To determine the reliability of the data in performance analysis and perception analysis of the questionnaire results, validity and reliability tests were carried out. The results of the performance analysis show that the Tual PSDKP Base has carried out supervision activities well as seen from the performance achievements that have been determined, however, according to the results of the analysis of perceptions from respondents, improvements still need to be made to support supervision activities optimally, namely by developing and increasing human resource competency, as well as providing adequate monitoring facilities and infrastructure. The implementation of these strategies is expected to increase the effectiveness of supervision, reduce violations, and support the termination of marine and fisheries resources in the Tual PSDKP Base area.

Abstrak (Indonesia)

Efektivitas pengawasan merupakan faktor kunci dalam menjaga kelestarian sumberdaya serta mencegah tindakan ilegal yang merugikan negara, sehingga perlu mencari strategi peningkatan kinerja pengawas di Pangkalan PSDKP Tual penting dalam memberantas *IUU Fishing*. Penelitian ini akan mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual. Penelitian ini menggunakan analisis kinerja dan analisis persepsi dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui kehandalan data pada analisis kinerja dan analisis persepsi terhadap hasil kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisis kinerja menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan kegiatan pengawasan dengan baik yang dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan, namun menurut hasil analisis persepsi dari responden, masih perlu dilakukan peningkatan untuk mendukung kegiatan pengawasan secara optimal yaitu dengan melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat

Article History*Submitted: 6 Oktober 2024
Accepted: 12 Oktober 2024
Published: 13 Oktober 2024***Key Words**monitoring performance,
marine and fisheries
resources, perception, Tual
PSDKP Base**Sejarah Artikel***Submitted: 6 Oktober 2024
Accepted: 12 Oktober 2024
Published: 13 Oktober 2024***Kata Kunci***kinerja pengawasan,
sumberdaya kelautan dan
perikanan, persepsi,
Pangkalan PSDKP Tual*

meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi pelanggaran, serta mendukung keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Pangkalan PSDKP Tual.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Total luas wilayah perairan laut Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta km², yang mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam rangka mengelola sumber daya laut tersebut, Indonesia telah membagi perairannya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Berdasarkan estimasi, sumber daya ikan yang ada diperkirakan mencapai sekitar 12,01 juta ton, sementara jumlah tangkapan yang diizinkan ditetapkan sebesar 8,6 juta ton di seluruh WPP. Perikanan di Indonesia memainkan peran krusial dalam menyediakan bahan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Potensi besar pada bidang perikanan yang dimiliki wilayah WPP 718 sering kali tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah seperti praktik penangkapan ikan ilegal, destruktif, dan tidak dilaporkan (*IUU Fishing*). Aktivitas *IUU Fishing* tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merusak keberlanjutan ekosistem laut dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Tantangan lainnya dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia mencakup degradasi ekosistem yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain itu, praktik *IUU Fishing* baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal domestik masih marak terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, kelembagaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penegak hukum dan pemangku kepentingan di sektor kelautan (KKP, 2020).

Penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kerusakan ekosistem laut dan menurunnya populasi ikan di perairan Indonesia (Bondaroff *et al.*, 2015). Praktik ilegal ini sering kali terorganisir dan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan *IUU Fishing* diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya (Risnain, 2017). Kebijakan pengawasan perikanan telah dirancang melalui beberapa tahapan, yang meliputi pengawasan operasional, pemantauan di laut, serta penyediaan infrastruktur pendukung pengawasan diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Menurut Harian Republika (diunduh 20 Juli 2024) bahwa *illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 20 milyar dolar AS per tahun. Kebijakan pengawasan perikanan dijalankan melalui tahapan yaitu tahap operasional pengawasan

perikanan dan kelautan, tahap operasional pemantauan dan operasi pengawasan di laut, tahap operasional penanganan pelanggaran dan tahap penyediaan infrastruktur pengawasan.

Peran pengawas sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pengawasan yang dilakukan secara optimal dapat membantu mencegah berbagai permasalahan, seperti penangkapan ikan ilegal, serta memastikan sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Namun, kinerja pengawas di lapangan sering kali belum mencapai hasil yang diharapkan, yang disebabkan oleh kendala dalam hal sarana, prasarana, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.

Pangkalan PSDKP Tual merupakan salah satu UPT PSDKP yang berlokasi di Kota Tual, Provinsi Maluku dengan wilayah kerja pengawasan meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya serta Provinsi Papua Selatan dan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni : WPP 714 meliputi perairan Laut Banda, WPP 715 (meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni) dan WPP 718 meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru. Wilayah ini, yang meliputi WPP 714, 715, dan 718, dikenal memiliki potensi perikanan yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan pengawasan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan di wilayah ini, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan sistem koordinasi. Permasalahan yang timbul dari kinerja pengawasan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, yang meliputi sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, insentif, dan motivasi (Hapsari *et al.*, 2013).

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, mulai dari Juni – Agustus 2024. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual, Jalan Bukit Dumar No. 1 Kompleks PPN Tual, Kotamadya Tual, Provinsi Maluku 97611.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner serta wawancara dengan pihak internal Pangkalan PSDKP Tual, yang berkaitan dengan analisis kinerja. Pada analisis kinerja ditanyakan beberapa hal diantaranya adalah gambaran umum mengenai Pangkalan PSDKP Tual, tugas dan fungsinya, jumlah pelaku usaha perikanan dan kelautan yang diawasi, cakupan area pengawasan, serta rekapitulasi kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah ditangani.

Seperti halnya analisis kinerja, analisis persepsi juga dilakukan melalui pengisian kuesioner serta wawancara dengan pihak internal Pangkalan PSDKP Tual. Pada analisis

persepsi ditanyakan beberapa hal diantaranya mengenai kondisi eksisting dan harapan mengenai peningkatan kinerja di Pangkalan PSDKP Tual. Selain itu juga ditanyakan persepsi integritas dan persepsi korupsi di Pangkalan PSDKP Tual.

Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui kajian literatur atau studi pustaka dari berbagai sumber. Selain itu, data sekunder juga didapat melalui laporan kinerja Pangkalan PSDKP Tual.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pangkalan PSDKP Tual. Sampel yang digunakan adalah Pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri dari Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Awak Kapal Pengawas, Pejabat Struktural, serta Ketua Tim Kerja dengan total populasi sebanyak 150 orang.

Penentuan jumlah sampel untuk menganalisis kinerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Tual dan menganalisis persepsi responden terhadap Pangkalan PSDKP Tual dilakukan dengan cara perhitungan statistik menggunakan rumus *Slovin*. Ramdhan (2021) menyebutkan bahwa rumus *Slovin* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dari populasi yang telah diketahui jumlahnya agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Untuk tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah sebesar 0,1 atau presisi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. Rumus *Slovin* adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n : ukuran sampel/ jumlah responden
- N : ukuran populasi
- E : persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1 dengan tingkat kepercayaan 90%. Alasan digunakan error 10% adalah mengacu pada tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditolerir pada penelitian ilmu sosial

Berdasarkan rumus *Slovin*, maka besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ n &= \frac{150}{1 + 150(0,1)^2} \\ &= 60 \end{aligned}$$

Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang.

D. Uji Instrumen

Pada analisis kinerja dan analisis persepsi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pada perumusan strategi dengan menggunakan AHP dilakukan uji konsistensi sebagai berikut :

1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan *Pearson Correlation*. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengetahui instrumen kuesioner penelitian valid untuk dilakukan proses pengambilan data. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Software Microsoft Excel* dan *SPSS 26*. Hasil pengujian dinilai berdasarkan kriteria berikut: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dianggap valid; jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka data dianggap tidak valid (Meivera, 2022).

2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dianggap *reliabel* atau handal jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa dapat dipercaya instrumen tersebut (Widi, 2018). Meskipun instrumen sudah terstandar dan terbukti *reliabel*, tetap perlu dilakukan uji coba ulang setiap kali akan digunakan. Uji reliabilitas untuk setiap instrumen pada setiap pertanyaan dilembar kuesioner dilakukan menggunakan rumus *Alpha* di *Microsoft Excel* dan *SPSS 26*.

H. Analisis Data

1 Analisis kinerja Pangkalan PSDKP Tual

Analisis kinerja pada Pangkalan PSDKP Tual dilakukan dengan melihat capaian kinerja kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Analisis dilakukan secara deskriptif.

2 Analisis Persepsi Pangkalan PSDKP Tual

Analisis persepsi Pangkalan PSDKP Tual menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja Pangkalan PSDKP Tual. Analisis dilakukan melalui pengisian kuesioner yang disebar kepada responden secara acak. Analisis persepsi dilakukan secara deskriptif untuk melihat faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Tual

1 Keragaan Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari empat kelompok, yaitu Ketua tim kerja di lingkup Pangkalan PSDKP Tual, Pegawai Fungsional Teknis yang bertugas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pegawai pelaksana, serta Awak Kapal Pengawas yang berada di Pangkalan PSDKP Tual. Sebanyak 60 responden telah diwawancarai dengan menggunakan instrumen kuesioner, dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode *technical efficiency analysis* (Natsir *et al.*, 2017). Hasil dari deskripsi statistik dirangkum dalam.

Tabel 2. *Summary* statistik responden dengan menggunakan *technical efficiency analysis*

Variabel	Jumlah	Satuan	Summary Statistics
----------	--------	--------	--------------------

Kelompok Responden			Rata – rata	Standar Deviasi	Nilai Skala Minimum	Nilai Skala Maksimum	
N = 60							
SWOT Analysis	Ketua tim kerja	5	Orang	3.638	0.889	1	5
	Pegawai Fungsional	25	Orang	3.205	1.203	1	5
	Teknis						
	Pegawai pelaksana	15	Orang	3.158	1.063	1	5
	Awak kapal pengawas	15	Orang	3.563	1.077	1	5

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

2 Identitas Responden

Identitas responden memberikan gambaran umum mengenai para responden yang dijadikan sampel penelitian dan dianggap mewakili pegawai Pangkalan PSDKP Tual. Pada penelitian ini, sebanyak 60 kuesioner telah disebarkan kepada responden. Identitas responden kemudian dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, masa kerja, dan tingkat pendidikan.

3 Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh jumlah responden pria dan wanita yang ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jenis kelamin responden

No.	Jenis kelamin responden	Jumlah	Presentase
1.	Pria	50	83,33%
2.	Wanita	10	16,67%
Total		60	100,00%

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan data identitas responden menurut jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah responden pria mencapai 83,33%, jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden wanita yang hanya sebesar 16,67%. Perbedaan ini disebabkan oleh tingginya jumlah responden pria yang ditemukan selama proses penelitian. Selain itu, rasio jenis kelamin di kalangan pegawai di Pangkalan PSDKP Tual juga menunjukkan bahwa jumlah pegawai pria lebih dominan dibandingkan dengan wanita.

4 Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia menggambarkan distribusi usia responden dalam penelitian ini. Usia responden dikelompokkan ke dalam empat kategori yang berbeda. Gambaran lengkap mengenai profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Usia responden

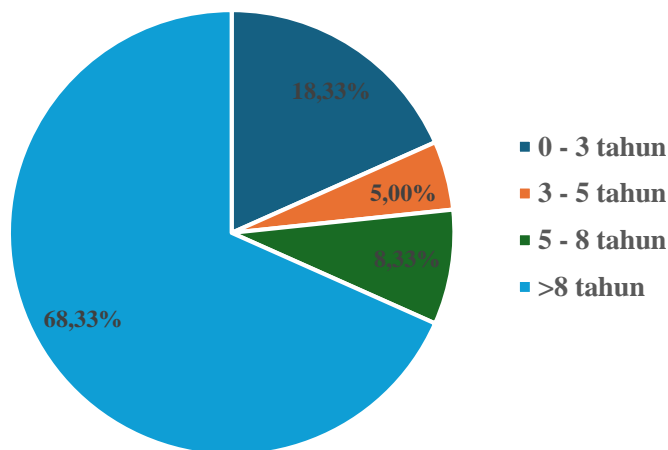
No.	Usia responden	Jumlah	Presentase
1.	≤ 30 tahun	7	11,67%
2.	31 – 40 tahun	34	56,67%
3.	41 – 50 tahun	17	28,33%

No.	Usia responden	Jumlah	Presentase
4.	≥ 50 tahun	2	3,33%
	Total	60	100,00%

Berdasarkan data dalam Tabel 4.3, responden dengan rentang usia ≤ 30 tahun berjumlah 11,67%, sedangkan responden berusia 31 – 40 tahun berjumlah 56,67%. Responden dalam rentang usia 41 – 50 tahun mencapai 28,33%, dan hanya 3,33% responden yang berusia ≥ 51 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Pangkalan PSDKP Tual berada dalam usia produktif, khususnya dalam kelompok usia 31 – 40 tahun.

5 Masa Kerja

Deskripsi responden berdasarkan masa kerja memberikan gambaran mengenai distribusi masa kerja responden. Masa kerja responden dibagi menjadi empat kategori, yaitu 0 – 3 tahun, 3 – 5 tahun, 5 – 8 tahun, dan ≥ 8 tahun. Profil lengkap mengenai masa kerja responden ditampilkan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada Gambar 1.



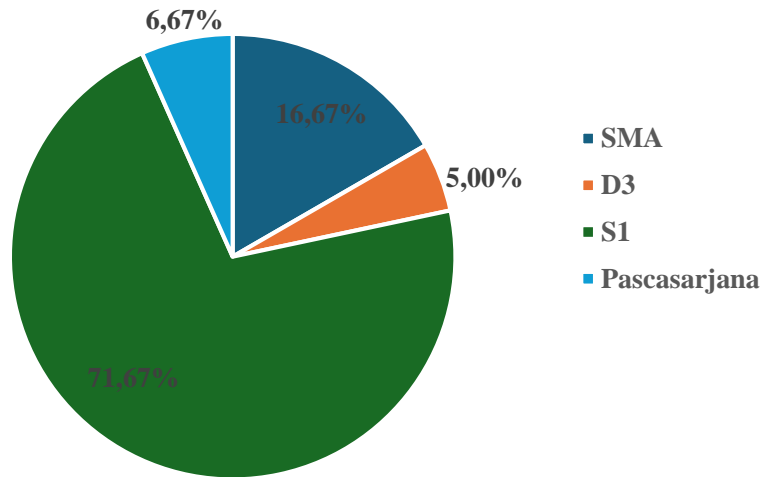
Gambar 1. Masa kerja responden

Berdasarkan Gambar 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase terbesar responden adalah mereka yang memiliki masa kerja lebih dari 8 tahun, yaitu sebanyak 68,33%. Diikuti oleh responden dengan masa kerja 0 – 3 tahun sebanyak 18,33%, kemudian 5 – 8 tahun sebesar 8,33%, dan yang terakhir responden dengan masa kerja 3 – 5 tahun sebesar 5%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai dengan pengalaman kerja lebih dari 8 tahun, sehingga memiliki lebih banyak pengalaman dalam menilai kinerja pengawasan Pangkalan PSDKP Tual.

6 Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai distribusi pendidikan responden. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat jenjang, yaitu SMA/SMK, Diploma 3, Sarjana, dan

Pascasarjana. Profil lengkap responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui grafik yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tingkat pendidikan responden

Berdasarkan grafik yang ditampilkan pada Gambar 4.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), dengan persentase sebesar 71,67%. Diikuti oleh responden dengan pendidikan SMA yang mencapai 16,67%, Pascasarjana sebesar 6,67%, dan Diploma sebanyak 5%. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan pada tingkat Sarjana. Hal ini menunjukkan komitmen Pangkalan PSDKP Tual dalam meningkatkan kompetensi pegawai, salah satunya melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

7 Uji Instrumen

Pada analisis kinerja dan analisis persepsi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pada perumusan strategi dengan menggunakan AHP dilakukan uji konsistensi sebagai berikut :

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan *Pearson Correlation*. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengetahui instrumen kuesioner penelitian valid untuk dilakukan proses pengambilan data. Hasil pengujian dinilai berdasarkan kriteria berikut: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dianggap valid; jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka data dianggap tidak valid. Hasil uji validitas pada kuesioner penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji validitas pada kuesioner penelitian

Komponen	Kode	nilai r hitung	nilai r tabel	Hasil Uji
Strength	ST.1	0.571	0,254	Valid

	ST.2	0.613	0,254	Valid
	ST.3	0.442	0,254	Valid
	ST.4	0.49	0,254	Valid
Weakness	WE.1	0.418	0,254	Valid
	WE.2	0.486	0,254	Valid
	WE.3	0.265	0,254	Valid
	WE.4	0.416	0,254	Valid
Opportunities	OP.1	0.571	0,254	Valid
	OP.2	0.613	0,254	Valid
	OP.3	0.442	0,254	Valid
	OP.4	0.49	0,254	Valid
Threats	TH.1	0.585	0,254	Valid
	TH.2	0.486	0,254	Valid
	TH.3	0.639	0,254	Valid
	TH.4	0.551	0,254	Valid

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji validitas pada kuesioner penelitian dengan menampilkan seluruh item pertanyaan yang bersangkutan terhadap pertanyaan tersebut menunjukkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan demikian seluruh item pertanyaan pada dua variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dianggap *reliabel* atau handal jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa dapat dipercaya instrumen tersebut. Meskipun instrumen sudah terstandar dan terbukti *reliabel*, tetap perlu dilakukan uji coba ulang setiap kali akan digunakan. Hasil uji reliabilitas pada instrumen kuesioner dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji reliabilitas

No.	Nilai Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Simpulan
1	0,798	<i>Reliable</i>

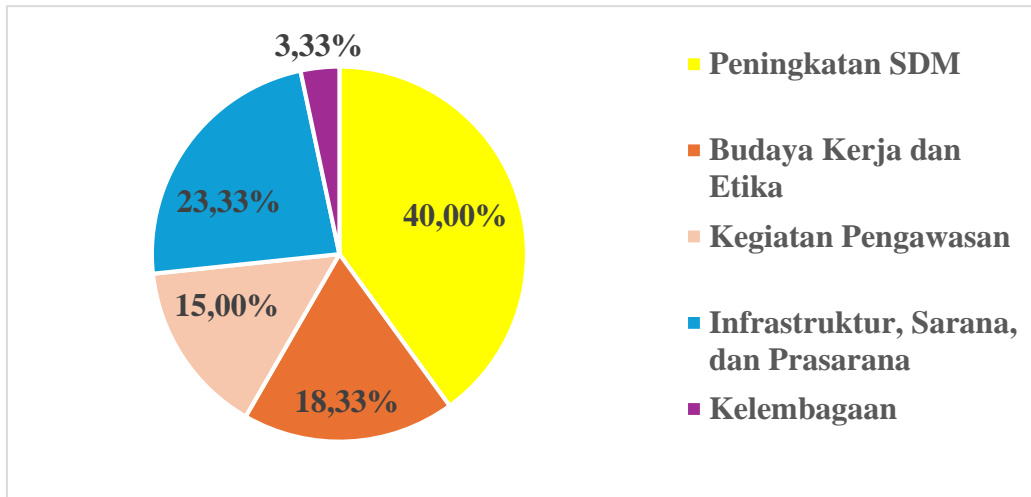
Berdasarkan Tabel 6 hasil uji reliabilitas pada kuesioner penelitian memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel beserta item pertanyaan kuesioner penelitian yang digunakan dinyatakan *reliable* artinya instrumen penelitian handal dan dapat dipercaya.

B. Persepsi terhadap Pangkalan PSDKP Tual

1 Persepsi dan Harapan Terkait Kinerja Pengawasan

Pandangan, evaluasi, serta harapan terhadap Pangkalan PSDKP Tual menggambarkan bagaimana kinerja dan performa yang dirasakan oleh para responden dan pihak terkait. Persepsi ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap 60 responden. Daftar pertanyaan yang diajukan mencakup saran dan harapan terkait peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP

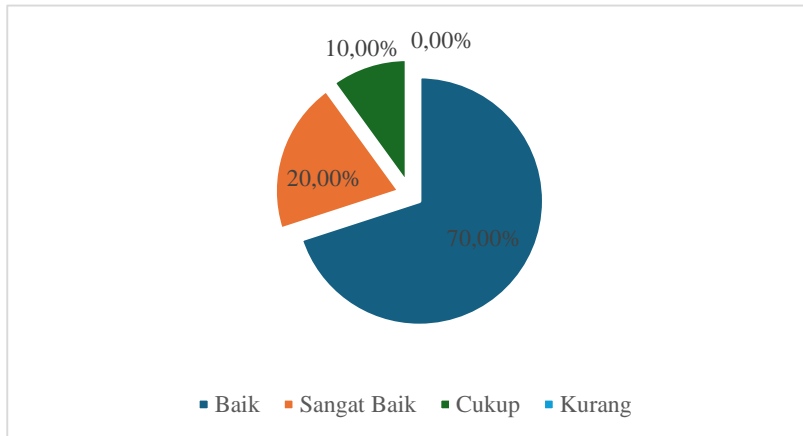
Tual. Hasil wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Faktor-faktor tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 3.



Berdasarkan hasil persepsi responden yang ditampilkan dalam grafik pada Gambar 3, diketahui bahwa sebanyak 40% dari faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini meliputi penambahan jumlah pengawas di setiap Satuan Pengawasan, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengawas, serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Selain itu, faktor infrastruktur, sarana, dan prasarana juga dianggap berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Tual, terutama melalui penambahan armada pengawasan, fasilitas pendukung, dan akses internet di wilayah kerja yang sulit dijangkau.

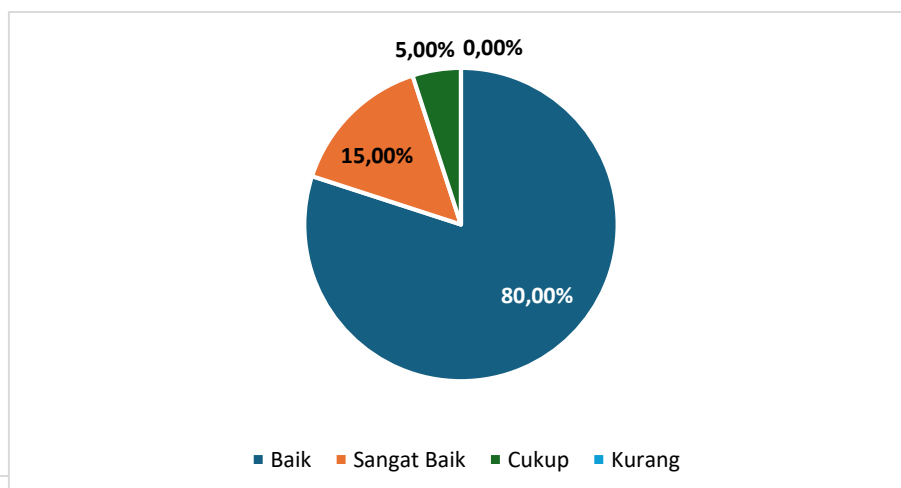
2 Persepsi terhadap Integritas Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Integritas pengawas di lingkungan kerja merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual, persepsi terhadap integritas pengawas mencerminkan sejauh mana profesionalisme dan etika kerja pengawas dilihat oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Persepsi ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah yang strategis ini. Berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner, persepsi responden terhadap nilai – nilai integritas di Pangkalan PSDKP Tual menilai sudah baik dalam menjalankan program budaya kerja PILAR (profesional, integritas, loyalitas, inovatif, sinergi).



Gambar 3. Penerapan nilai-nilai integritas di Pangkalan PSDKP Tual

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi isu yang sering dikaitkan dengan rendahnya kualitas pelayanan publik dan pengawasan di Indonesia. Persepsi terhadap tingkat KKN di Pangkalan PSDKP Tual tidak terlepas dari tantangan ini. Tingkat KKN yang dirasakan atau dipersepsikan oleh masyarakat serta stakeholder di lingkup Pangkalan PSDKP Tual dapat mempengaruhi pandangan terhadap integritas pengawas yang bertugas. Tingginya persepsi KKN akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi dan menurunkan moral kerja di lingkungan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner, persepsi responden terhadap tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pangkalan PSDKP Tual menilai bahwa Pangkalan PSDKP Tual sudah baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN tidak ditemukan adanya praktik-praktik KKN.



Gambar 4. Persepsi terhadap implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN

Persepsi KKN dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan, ketersediaan informasi mengenai proses pengawasan, serta akuntabilitas dari para pengawas itu sendiri. Sejalan dengan upaya Ditjen PSDKP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, penekanan pada nilai integritas sangatlah penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga ini dapat terus dijaga.

Peningkatan kinerja pengawasan dan menanggulangi tantangan terkait integritas serta persepsi KKN, Ditjen PSDKP telah merumuskan lima nilai utama yang dikenal sebagai **PILAR** (profesional, integritas, loyalitas, inovatif, dan sinergi). Kelima nilai ini bertujuan untuk membentuk budaya organisasi yang kokoh dan berkelanjutan di setiap unit pengawasan, termasuk di Pangkalan PSDKP Tual.

1. **Profesional**

Pengawas di Pangkalan PSDKP Tual dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai dan kemampuan bekerja secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. Dengan menerapkan nilai profesionalisme, diharapkan seluruh pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan standar yang tinggi, menjaga kualitas pengawasan serta mampu menghadapi tantangan yang muncul, termasuk godaan KKN.

2. **Integritas**

Nilai integritas merupakan landasan yang paling penting dalam mencegah terjadinya praktik KKN. Seorang pengawas yang berintegritas akan selalu menjalankan tugasnya dengan jujur, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di Pangkalan PSDKP Tual, peningkatan integritas para pengawas sangat krusial untuk meningkatkan persepsi positif terhadap lembaga dan mengurangi potensi KKN.

3. **Loyalitas**

Loyalitas kepada negara dan institusi sangat diperlukan untuk menjaga fokus pengawas dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dengan loyalitas yang tinggi, pengawas akan tetap setia pada tujuan pengawasan dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan yang dapat merusak integritas mereka.

4. **Inovatif**

Dalam menghadapi berbagai tantangan baru, pengawas perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Di Pangkalan PSDKP Tual, inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pengawasan, pengembangan sistem monitoring yang lebih transparan, serta penyusunan strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi di lapangan.

5. Sinergi

Kolaborasi yang baik antara pengawas dengan pemangku kepentingan lain, seperti masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak swasta, merupakan kunci keberhasilan pengawasan di lapangan. Sinergi yang kuat akan memastikan proses pengawasan berjalan secara lebih komprehensif dan mencegah terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan di sektor tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis terhadap kinerja pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Tual menunjukkan bahwa telah ada upaya yang signifikan dalam pengawasan, namun masih terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal seperti pemenuhan SDM untuk menunjang pelaksanaan pengawasan, pemenuhan sarana prasarana pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan;
2. Analisis persepsi terhadap Pangkalan PSDKP Tual mengungkapkan bahwa terdapat pandangan beragam mengenai faktor – faktor yang dipandang sangat mempengaruhi kinerja pengawasan. Faktor yang paling mempengaruhi adalah peningkatan kompetensi SDM;

B. Saran

Langkah – langkah penting yang dapat dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual untuk meningkatkan kinerja pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu :

1. Fokus utama untuk peningkatan kinerja tersebut melalui program program pelatihan berkelanjutan yang mencakup baik keterampilan teknis maupun keterampilan lunak.
2. diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi untuk mendukung proses deteksi dan penanganan pelanggaran secara lebih optimal.
3. memperkuat kerjasama dengan instansi lain juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih terintegrasi dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., dan Shafira, M. (2020). Harmonisasi kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir lampung dalam rezim pengelolaan berbasis masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 6, No.2, 266-287.
- Bondaroff, P., Teale, N., Reitano, Tuesday and Wietsey, W. (2015). The illegal fishing and organized crime nexus: illegal fishing as transnational organized crime. Geneva (CH): The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish.
- Darko, A., Chan, A. P. C., Ameyaw, E. E., Owusu, E. K., Pärn, E., and Edwards, D. J. (2019). Review of application of analytic hierarchy process (AHP) in construction. *International journal of construction management*, Vol. 19, No. 5, 436-452.
- Fajriah, T.N.N., Boesono, H., dan Kurohman, F. (2020). Analisis kinerja satuan pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) terkait perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, Banten. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 9, No.1, 45-54.
- [FAO]. Food and Agricultural Organization. (1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO Fisheries Department. 24 Hal.
- Hajar, H. I. (2019). *Manajemen Strategik-Konsep Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta : Andi.
- Hapsari, D.I., Rosyid, A., dan Hapsari, T.D. (2013). Analisis kinerja satker pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 2, No. 1, 95-103.
- Hasibuan, M. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Holbeche, L. (2022). *Aligning human resources and business strategy*. Routledge.
- Hsu, T.H., and Tang, J.W. (2020). Development of hierarchical structure and analytical model of key factors for mobile app stickiness. *Journal of Innovation & Knowledge*, Vol. 5, No.1, 68-79.
- Istianda, M. (2014). Dampak politik UU No.5 Tahun 1979 terhadap kekuasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Tangerang Selatan : Disertasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Kurniawan, K., br Sebayang, M., dan Utami, E. (2019). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan menggunakan metode surplus produksi di perairan Kabupaten Bangka Tengah . *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, Vol. 15, No. 2, 129-133.
- Ma'mun, A., Priatna, A., dan Herlisman, H. (2018). Pola sebaran ikan pelagis dan kondisi oseanografi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 (WPP NRI 715) pada musim peralihan barat. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, Vol. 24, No. 3, 197-208.

- Mangkunegara, A.P., dan Prabu, A. (2015). Sumber daya manusia perusahaan. *Cetakan kedua belas*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S. (2011). Manajemen sumberdaya manusia strategik (edisi kedua). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mathis, R.L., and Jackson, J.H. (2012). Manajemen sumberdaya manusia. Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Jakarta : Salemba Empat.
- Marimin dan Maghfiroh, N. (2014). Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Bogor: IPB Press. 281 hal.
- Marimin, M., Wibisono, A., dan Darmawan, M. A. (2017). Decision support system for natural rubber supply chain management performance measurement: a sustainable balanced scorecard approach. *International Journal of Supply Chain Management*, Vol. 6, No. 2, 60-74.
- Meivera, A., Dewi, N.M.A.R., dan Puspitasari, C.E. (2022). Uji validitas dan reliabilitas kuesioner penggunaan dan penyimpanan antibiotika di Kecamatan Ampenan. *Journal Archives Pharmacia*, Vol. 4, No. 1, 9-10.
- Munier, N., and Hontoria, E. (2021). Uses and limitations of the AHP method. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
- Musrifah, M.S., dan Lamoh, S.H.D. (2021). Analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek pembangunan gedung asrama MAN 1 Tulehu Maluku Tengah. *J Simetrik*. Vol. 11, No. 1, 432–439.
- Nababan, ER. (2018). Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau. Batam : Skripsi thesis, Prodi Administrasi Negara.
- Natsir, Moh., Widodo, A.A., Wudianto., dan Agnarsson, S. (2017). Technical efficiency of fish aggregating devices associated with tuna fishery in Kendari Fishing Port – Indonesia. *Indonesian Fisheries Research Journal*. Vol.23, No. 2, 97-105.
- Rangkuti, F. (2013). *SWOT–Balanced Scorecard*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rada, B. G., Ramos, E. B., Riva, C. J., and Royo, N. R. (2019). Preliminary study on spawning period and length at maturity of shortfin scad, *Decapterus macrosoma*, (Bleeker, 1851, Perciformes: Carangidae) from the Coastal Waters of San Fernando, Romblon.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Jakarta : Cipta Media Nusantara.
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 4, No. 2, 379-398.
- Sartimbul, A., Iranawati, F., Sambah, A. B., Yona, D., Hidayati, N., Harlyan, L. I., dan Fuad, M.A.Z. (2017). *Pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis di Indonesia*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Simamora, Henry (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIEY

- Sjafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Sule, E. T., dan Saeful, K. (2019). *Pengantar manajemen*. Jakarta : Prenada Media.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., dan Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 97-100.
- Tampubolon, H. (2016). Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Widi, R. (2018). Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian epidemiologi kedokteran gigi. *Stomatognatic*. Vol. 8, No. 2, 27–34.
- Yuliana, A., Wibowo, B.A., dan Fitri, A.D.P. (2018). Analisis Kinerja Pengawas Perikanan Dalam Penerapan Monitoring, Controling, and Surveillance (Studi Kasus Di Pangkalan PSDKP Jakarta). *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 7, No. 4, 39-48.